

JAGA DAN PERGUNAKANLAH KOLEKSI
INI DENGAN BAIK

SUATU SAAT ANAK DAN CUCU ANDA
SANGAT MEMBUTUKANNYA

Peranan Perguruan Tinggi Dalam Menyikapi Ancaman Disintegrasi Bangsa

OLEH
DR. Nizwardi Jalinus M.Ed

Disajikan dalam kegiatan Seminar sehari satuan Resimen
mahasiswa 102 Maha Bhakti Universitas Negeri Padang pada
tanggal 7 Juni 2001 di Padang

PUSKAPUS PERPUSTAKAAN UNIV. NEGERI PADANG	
DITERIMA TEL.	: 7-3-2006
SUMBER/MARGA	: H /
KOLEKSI	: K1
NO. INVENTARIS	: 61/K/2006 - P1
KLASIFIKASI	: 378.01 JAL - AD

(2)

Resimen Mahasiswa 102 Maha Bhakti
Universitas Negeri Padang

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIV. NEGERI PADANG

PERANAN PERGURUAN TINGGI DALAM MENYIKAPI ANCAMAN DISINTEGRASI BANGSA

Nizwardi Jalinus

A. Pendahuluan

Ketika Soekarno Hatta memproklamkan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, semangat negara kesatuan dibangun dengan menanamkan semangat nation building. Soekarno dalam setiap pidato dan ajarannya mencoba menyuarakan persatuan dan kesatuan Indonesia sebagai sebuah bangsa yang besar. Memasuki era Suharto selama 32 tahun Indonesia dibawa ke alam stabilitas politik ekonomi sosial dan keamanan dengan dukungan kekuatan militer yang solid, walaupun dengan memasung demokrasi dan mengabaikan Hak azasi Manusia (HAM), hasilnya berbagai perbedaan dapat dicegah. Habibi mencoba dalam kurun waktu yang singkat mencoba menegakkan demokrasi secara benar, namun masyarakat yang baru mengenyam kebebasan melalui reformasi cenderung melahirkan demokrasi yang kebablasan, muncul ego lokalisme yang tinggi dan separatisme yang cenderung memporakporandakan kesatuan dan persatuan.

Reformasi yang mendadak memang pelajaran berharga bagi bangsa ini untuk mawas diri dan menyesuaikan diri dengan norma demokrasi yang benar, demokrasi yang dapat menerima perbedaan pendapat, demokrasi yang dapat menghargai pendapat dan keberadaan orang lain dalam kebersamaan. Demokrasi yang menghargai hak azasi manusia, bukan memaksakan pendapat demi untuk kepentingan pribadi atau kelompok atau untuk mempertahankan kekuasaan, bukan demokrasi yang memaksakan kehendak melalui demonstrasi yang anarkis, merusak dan emosional,

sehingga nilai-nilai peradaban manusia terabaikan. Ledakan reformasi memang berdampak pada penurunan kadar persatuan dan kesatuan, nilai kesepahaman antar suku (etnis) telah luntur, nilai kerukunan beragama terkontaminasi dengan provokasi tak mendasar, tindakan represif dan penindasan meledak menjadi dendam yang membara, keparadokan kesejahteraan antara pusat dan daerah menjadi pemicu disintegrasi. Sehingga munculah Papua Merdeka, Riau merdeka, Aceh Merdeka, peristiwa Ambon, exodus orang Madura dari Kalimantan dll.

Tugas pendidikan tinggi adalah untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau professional, serta kemampuan kepemimpinan yang tanggap terhadap kebutuhan pembangunan serta perkembangan IPTEK, berjiwa penuh pengabdian, dan memiliki rasa tanggungjawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara dengan landasan norma-norma agama, akademis, etika, moral, dan wawasan kebangsaan yang tangguh.

Berkenaan dengan tugas berat ini, perguruan tinggi perlu merumuskan kembali makna Persatuan dan Kesatuan bangsa dengan tujuan agar makna Bhinneka tunggal ika tidak hanya sebatas slogan saja, tapi sesuatu yang dihayati dan dicerminkan dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat.

B. Faktor Pemicu Disintegrasi Bangsa

Oemar (2001) menggambarkan konflik Aceh dengan lumuran darah selama kurun waktu DOM adalah buah dari penanganan yang salah. Maimul Fidar

pemerhati HAM menegaskan bahwa “konflik Aceh lahir dan besar oleh sebuah system yang mengedepankan keamanan (militer) dibandingkan dengan pendekatan budaya, agama atau dialogis yang lebih mengutamakan nuansa kemanusiaan” (hal,9)

Wawa J.E (2001) mengemukakan bahwa konflik Etnis di Kalimantan telah membinasakan ribuan nyawa manusia. Berdasarkan catatan Prof Dr.Syarif Ibrahim AlQadri telah terjadi 12 kali tragedy besar sejak tahun 1962, antara etnis Dayak dengan Madura dan Melayu dengan Madura. Gara-gara gagal mempertahankan Habibi sebagai Presiden, Sulawesi Selatan mengissukan pula separatisme Sulawesi Merdeka. Ambon terbakar dengan isu antar Agama. Papua Merdeka dipekirakan pula dengan isu kesenjangan kesejahteraan antara pusat dan daerah. Sumber daya Alam Papua dijarah dan diisap bukan untuk membangun Papua, tetapi untuk diserahkan kepusat. Riau berdendang pula dengan nada yang sama. Akhir-akhir ini Jawa Timur juga ikut menggelar nada minornya untuk mempertahankan kepemimpinan Kiyainya.

Berdasarkan berbagai phenomena diatas dapat disimpulkan bahwa ada 4 (empat) faktor utama yang menjadi penyebab lunturnya perekat kebangsaan bangsa ini.

1. Perbedaan Suku, Agama, dan Ras antar etnis di Indonesia dapat dijadikan tumbal persengkataan antar mereka. Gejolak yang terjadi seperti di Kalimantan dan Ambon adalah contoh kongkrit dari phenomena ini. Mengapa rasa kebangsaan dan rasa tenggang rasa kerukunan dan saling menghargai keberadaan saudara yang lain

tidak dapat muncul kepermukaan, hal ini menunjukkan bahwa faktor perbedaan lebih dominan dari faktor kebersamaan. Ternyata keberagaman belum mempunyai kohesiveness yang kuat sebagai perekat bangsa.

2. Ketertindasan dan ketertekanan menimbulkan dendam yang membara, Sistem keamanan yang diterapkan secara represif menimbulkan dendam yang membara disaat angin reformasi dihembuskan.
3. Kesenjangan kesejahteraan antara pusat dan daerah juga merupakan pemicu munculnya gejala disintegrasi, terutama bagi daerah yang SDA nya cukup mapan seperti Papua dan Riau.
4. Politik untuk kekuasaan, faktor politik dan kekuasaan juga turut mewarnai gejala disintegrasi. Karena kefanatikan atau karna faktor pemimpinnya dari sekelompok masyarakat didaerah, seenaknya saja kadangkala mendeklarasikan disintegrasi.

C. Peran Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi adalah lembaga pendidikan yang secara akademik mendidik para intelektual muda bukan saja memiliki ilmu pengetahuan dan kemampuan dalam bidang ilmunya, juga mempunyai jiwa kepemimpinan sebagai calon pemimpin bangsa dimasa depan (student today leader tomorrow). Oleh karena itu dalam menghadapi kehidupan bangsa yang dalam keterpurukan dewasa ini, terutama untuk agar bangsa ini terhindar

dari Yugoslavia kedua atau Uni soviet kedua, perlu dilakukan suatu gerakan antisipatif oleh perguruan tinggi secara bersama. Terutama dengan menanamkan rasa persatuan dan kesatuan, rasa teposeliro, raso pareso, toleransi, solidaritas, menghargai keberadaan orang lain yang mungkin saja tidak seagama, tidak sesuku, atau berbeda ras, namun mereka juga bangsa Indonesia. Etnik berbeda, budaya local berbeda, bahasa dan logat berbeda, adat istiadat berbeda, namun diikat oleh silaturahmi kebangsaan yang kohesivenessnya sangat erat. Agar terwujudnya sikap dan perilaku keIndonesiaan yang satu bangsa, satu nusa dan satu bahasa, sebagaimana diikrarkan pemuda Indonesia di hari sumpah pemuda (28 Oktober 1928), perguruan tinggi perlu mengembangkan pendidikan demokrasi, pendidikan neonasionalisme dan pendidikan multikultural dikampus.

1. Pendidikan Demokrasi

Semboyan demokrasi seperti di Perancis :Liberte, egalite, fraternite atau di Amerika “ Government of the people, by the people, and for the people”. Makna yang dikandung adalah masyarakat yang demokrasi yaitu masyarakat yang memiliki kehidupan bersama, dimana setiap warganya memiliki martabat sebagai makhluk manusia di bumi ini. Oleh karena itu mereka merdeka untuk memiliki keyakinan dan pendirian dan tidak bisa dipaksa oleh siapapun. Zamroni (2001, hal 28) menyatakan bahwa pemerintahan yang demokrasi akan bersandar pada kekuasaan yang bersumber dari kemampuan dan pengetahuan masyarakatnya. Oleh karena itu pemerintahan yang demokratis akan memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Karena semakin banyak warga yang



memperoleh pendidikan atau semakin tinggi pendidikan masyarakat maka kadar demokrasi dari masyarakat tersebut juga akan semakin tinggi.

Dewey dalam Zamroni (2001, hal 51) menyatakan bahwa demokrasi bukan sekedar menyangkut suatu bentuk pemerintahan, akan tetapi bentuk kehidupan bermasyarakat bersama, bernegara dan berbangsa. Lebih jauh diungkapkan bahwa kehidupan bersama yang berbasis demokrasi memerlukan hal-hal berikut :

1. Visi, misi dan kode etik yang dijabarkan secara formal dalam hukum dan undang-undang dipatuhi oleh setiap warga.
2. Sistem hukum yang objektif dan mandiri.
3. Sistem pemerintahan yang berdasar dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat serta good and clean government.
4. Struktur sosial , politik dan ekonomi yang menjauhi monopoli dan oligopoly, memungkinkan terjadinya mobilitas yang tinggi mobilitas yang adil bagi semua warga.
5. Kebebasan berpendapat, transparan, dan akomodatif.
6. Kebebasan menentukan pilihan pribadi.

Masyarakat demokratis adalah masyarakat yang memelihara budaya dan norma demokrasi seperti tepo sliro, penuh toleransi, menghormati perbedaan pendapat , akomodatif dan bukan memaksakan kehendak, memahami keanekaragaman, terbuka, transparansi, menjunjung harkat dan martabat manusia, saling menghargai, mampu mengendalikan diri, mengutamakan kebersamaan dan keseimbangan, anti represif dan diskriminatif. Oleh karena itu kampus sebagai lembaga pendidikan tinggi hendaknya merumuskan suatu program pendidikan demokrasi bagi mahasiswanya, dengan harapan

bahwa nilai-nilai demokrasi dapat dipahami dihayati dan diimplementasikan oleh masyarakat intelektual dalam perilaku kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa.

Iklm pendidikan yang perlu dikembangkan kampus adalah iklim kondusif yang mendahulukan model demokrasi ketimbang otokrasi, menghilangkan sikap dan tingkah laku represif dan diskriminatif yang ada disetiap diri pelaku pendidikan, baik ia seorang rektor, dekan, atau dosen. Otonomi dan kebebasan akademik dijunjung tinggi. Setiap mahasiswa adalah insan yang bermartabat berpotensi dan memiliki talenta sebagai calon intelektual, mereka berhak untuk berkembang dan tumbuh dengan bebas dan merdeka sesuai dengan nilai dan norma demokrasi yang didambakan masyarakat. Mereka adalah subjek pendidikan bukan objek pendidikan yang umumnya terdapat dalam model pendidikan konvensional.

Dimensi manajemen perguruan tinggi yang mengutamakan hak otonomi barangkali akan memberikan warna kampus yang lebih demokratis, dimana kebijakan pendidikan akan lebih ditentukan dengan pola bottom-up, maka dosen akan lebih kreatif untuk mengembangkan model pendidikan dan pengajaran yang berorientasi pada pemecahan masalah, pelaksanaan pendidikan dan pengajaran akan berjalan lebih dinamis. Kehidupan demokrasi di perguruan tinggi dapat ditandai dengan dilaksanakannya pemilihan umum presiden mahasiswa, pemilihan ketua BEM. Ketua Himpunan dan lain-lain. Melalui proses tersebut mahasiswa akan belajar bagaimana menegakkan azas-azas demokrasi dalam kehidupan masyarakat ilmiah. Azas demokrasi tersebut tertuang dalam kehidupan "student Government".

2. Pendidikan Neonasionalisme

Berbagai perubahan yang sangat cepat terjadi di era kesejagatan ini, telah membentuk suatu persepsi rasa nasionalisme yang berbeda dari sebelumnya. Zamroni (2001) menyebutnya sebagai nasionalisme baru.. Ciri-ciri nasionalisme baru ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- Cita-cita persatuan dan kesatuan bangsa mendapat penekanan pada pola pikir untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
- Kolektivisme dan kohesiveness
- Orientasi massa bukan elitisme
- Ideologi terbuka dan logis
- Menjaga martabat bangsa

Proses reformasi banyak mengubah karakter dan jati diri bangsa Indonesia, fenomena ini dapat dilihat dari berbagai indikasi perubahan sikap masyarakat dalam menenggarai suatu persoalan, dalam sekejap, seorang propokator dapat menyulap berpuh orang yang santun penuh toleran menjadi tirani yang dapat merusak apa saja, mengganggu ketertiban umum. Melalui kegiatan yang namanya unjuk rasa, demonstrasi, dan berakhir dengan pengrusakan, tindakan anarchis, sadistis. Bangsa yang dikatakan orang dahulu ramahtamah, berkepribadian, hanyut sudah, Sekarang muncul manusia Indonesia yang emosional, mudah tersulut isu, gampang digonjanganjing, kasar dan memaksakan kehendak. Hilang sudah azas demokrasi, hilang sudah rasa teposeliro, rasa dan periksa, rasa hormat saling menghargai sesama insan Indonesia.

Dosen dalam proses pendidikan mahasiswanya pada setiap perkuliahan, pembimbingan dan tutorial perlu mengembangkan aktifitas kultural untuk mewariskan nilai-nilai nasionalisme dengan reorientasi dan wawasan yang baru. Oleh karena itu dosen dituntut untuk mampu memberi warna baru nilai-nilai kebangsaan pada mahasiswanya. Misalnya dengan memanfaatkan 'Hidden curriculum' dalam kegiatan kurikuler atau ko-kurikuler, mendiskusikan berbagai isu kemasyarakatan, menekankan pola pikir global dengan tindakan berakar pada budaya lokal, menekankan arti efektif dan efisien yang meliputi ekonomi, keharmonisan lingkungan, solidaritas dan kebahagiaan untuk semua.

Makna pendidikan dalam konteks neo nasionalisme, bahwa mahasiswa perlu memahami lebih luas tentang tantangan masa depan bangsa dan Negara, dalam menghadapi era kesejagatan yang serba terbuka, terbuka secara kultural, artinya bahwa batas antar negara menjadi kabur, semua informasi baik yang bersifat maya, langsung dan tak langsung akan diterima oleh semua masyarakat melalui teknologi informasi yang canggih. Apabila pemahaman masyarakat tentang ideology, tentang wawasan kebangsaan tidak kohesif, maka integrasi bangsa akan luntur. Tanggungjawab lembaga pendidikan, pemerintah dan masyarakat itu sendiri pada prinsipnya sangat besar. Keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki masyarakat dan pemerintah banyak sedikit akan mempengaruhi mentalitas dan pandangan mahasiswa akan keutuhan negara Republik Indonesia

3. Pendidikan Multikultural

Pendidikan multikultural (Kebhinekaan) umumnya terdapat pada masyarakat pluralistis seperti Indonesia ini, yang memiliki beranekaragam suku (etnis), beragam budaya, ras dan agama, serta datang dari berbagai tingkat status sosial. Tantangan keberagaman ini tidak terlepas dari maraknya berbagai tindakan kekerasan seperti tawuran, kebrutalan massa dan pelaja, sampai nilai kemanusiaan menjadi luntur. Oleh karena itu perlu dilakukan pendidikan yang mampu memberikan kesadaran pada mahasiswa untuk dapat menghargai kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, bahkan berinternasional dalam era kesejagatan ini.

Implementasinya dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan baik ekstra maupun intra kurikuler. Misalnya peringatan hari besar nasional, mengadakan berbagai kegiatan seni dan budaya yang menampilkan berbagai karya seni dari berbagai etnis. Karena perlu dipahami bahwa fokus utama dalam pembentukan masyarakat multikultural adalah saling kerjasama, saling ketergantungan dan kesatuan bangsa. Berbagai kegiatan pembelajaran dikelas maupun dikelompok tertentu, dosen perlu memberikan contoh dan teladan, bahwa mahasiswa dalam belajar secara akademik mendapat perlakuan yang sama, mendapatkan penilaian dengan standar yang sama, tidak dibedakan walaupun mahasiswa tersebut datang dari luar daerah. Misalnya saja UNP berada di kota Padang, bukan berarti mahasiswa yang datang dari luar daerah Sumatera Barat, akan mendapat perlakuan yang berbeda, secara akademik mereka akan mendapatkan pelayanan yang sama.

Pada hakekatnya pendidikan multikultural akan bertumpu pada “sosial reproduction” artinya pendidikan yang diterima oleh generasi ini akan melahirkan dan membentuk generasi baru dimasa datang. Bila generasi itu

dididik dengan teladan kebersamaan dan solidaritas tinggi, maka akan lahir generasi yang mengutamakan persaudaraan dalam kehidupannya, kalau generasi itu mendapatkan pendidikan yang penuh nepotisme dan primordialisme, maka akan muncul generasi yang KKN, mendahulukan kepentingan diri sendiri dan kelompoknya. Gejala perbedaan yang menyangkut suku, agama, dan keturunan yang kadangkala mengarah berkembangnya paham rasialis dalam kehidupan masyarakat, menipisnya rasa toleransi beragama, kurangnya penghargaan antar suku, dapat mengakibatkan kohesiveness social masyarakat luntur. Kadangkala dipicu oleh masalah yang kecil terjadi perkelahian antar suku, antar kampung, antar geng. Ditingkat sekolah juga sering terjadi tawuran antar mahasiswa yang berasal dari daerah dan suku yang berbeda. Demikian sensitifnya bangsa kita dewasa ini, seolah-olah rasa persaudaraan, rasa sebangsa dan setanah air, luntur karena alasan kelompok yang disebut, suku, daerah, agama dan keturunan tadi.

Lembaga Pendidikan, apakah itu tingkat sekolah atau perguruan tinggi perlu melakukan pendidikan yang bersifat multikultural. Pendidikan yang bernuansa memandang sama setiap ras, suku, dan agama. Mereka dikenalkan untuk menghargai perbedaan, mereka dikenalkan pada sistem nilai yang beragam, sistem budaya yang bervariasi sebanyak suku bangsa yang terbilang, mereka dikenalkan pada kedaah-kaedah kebersamaan, persaudaraan, dan persatuan, Namun pada hakekatnya kita adalah satu bangsa, satu nusa, dan satu bahasa.

Pola pembelajaran dengan mahasiswa yang heterogen, sebaiknya diutamakan, ketimbang kelompok mahasiswa yang homogen. Biasanya mahasiswa dari satu daerah, cenderung untuk mengelompokkan diri menurut negeri asalnya, atau agamanya. Namun dalam pembagian kelompok atau

378.01
jal.
p2

kelas, perlu dilakukan pencampuran, sehingga kelas heterogen. Sebagai contoh umumnya perguruan tinggi di Australia atau Amerika, selalu mengadakan International day (Hari Internasional), dimana pada hari tersebut, kelompok mahasiswa dari berbagai bangsa mengadakan semacam bazar secara bersama-sama, dengan menampilkan masakan dari negaranya masing-masing. Momen ini Sangat penting bagi masyarakat kampus untuk menunjukkan bahwa setiap bangsa mempunyai budaya dan tradisi yang berbeda, Tetapi didalam kampus mereka sama, sebagai mahasiswa yang sedang menuntut ilmu.

D. Kesimpulan

Peranan perguruan tinggi dalam mengantisipasi atau membendung kecendrungan disintegrasi, memerlukan usaha sadar secara bersama dari setiap lapisan masyarakat, pemerintah dan universitas sendiri. Perguruan tinggi hendaknya dapat memberi contoh pada masyarakat tentang kehidupan kampus yang demokrasi, mampu membangun kembali rasa nasionalisme yang tinggi, membangkitkan kebhinekaan sebagai azas persatuan bangsa. Semua nilai-nilai tersebut selayaknya dapat ditumbuh kembangkan kembali oleh perguruan tinggi yang berfungsi sebagai wadah para intelektual, calon pemimpin bangsa dimasa depan.

Daftar Pustaka

- Oemar, N. (2001), **Rindu Damai ditanah Rencong**, dalam Demokrasi, Kekerasan, Disintegrasi, Penerbit Buku Kompas, Jakarta
- Wawa, J.E. (2001), **Konflik Etnis di Kalimantan Barat**, dalam Demokrasi, Kekerasan, Disintegrasi, Penerbit Buku Kompas, Jakarta



Zamroni, (2001), **Pendidikan untuk Demokrasi, Tatanan menuju civil society.**
Bigraf Publishing , Yogyakarta